

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Kesejahteraan rakyat adalah keadaan aman, selamat dan makmur, baik dalam kondisi jasmani maupun rohani yang dirasakan oleh segenap penduduk dalam suatu negara. Kesejahteraan rakyat mengandung makna kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin seluruh rakyat yang berisikan unsur kualitas beragama, tingkat pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta pelayanan sosial.

Upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah dan rakyat. Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk 1) memimpin dengan berlaku adil, 2) memberikan kebijakan pemerintah yang desentralistik, 3) fokus pada pengembangan keterampilan kerja, 4) mengatur sistem ekonomi secara tepat, 5) menempatkan masyarakat sebagai subyek bukan obyek, dan 6) mengelola kemiskinan yang berbeda-beda antara kota dengan pedesaan .Rakyat untuk mendapatkan kemajuan materi atau kekayaan, mempunyai kewajiban untuk melakukan segala pekerjaan dengan penuh usaha (*utthāna sampadā*), menjaga kekayaan yang telah didapat (*ārakkha sampadā*), bergaul dengan para sahabat yang bisa hidup bersama baik dalam keadaan susah dan senang (*kalyānamitta*), dan hidup seimbang (*samajīvikāta*).

Kesejahteraan rakyat secara materi menurut pandangan agama Buddha dapat mendatangkan berbagai macam kebahagiaan, baik secara fisik maupun batin. Kebahagiaan-kebahagiaan tersebut adalah; 1) *atti-sukha* yaitu untuk menikmati jaminan kekayaan yang diperoleh secara adil dengan maksud sepantasnya; 2) *bhoga-sukha* yaitu menggunakan kekayaan dengan murah hati untuk diri sendiri, keluarga, sahabat-sahabat dan sanak saudara, dan untuk perbuatan-perbuatan yang terpuji; 3) *anana-sukha* yaitu terbebas dari utang-utang; kebahagiaan; dan 4) *anavajja-sukha* yaitu menjalani kehidupan sempurna, suci dan kehidupan tanpa cela, tidak melakukan kejahatan melalui pikiran, ucapan atau perbuatan. Upaya-upaya untuk mendapatkan kebahagiaan secara batin, harus memenuhi empat syarat yaitu: 1) keyakinan (*saddhā*); 2) kemoralan (*sīla*); 3) kemurahan hati (*cāga*); dan 4) kebijaksanaan (*paññā*). Seseorang setelah mengumpulkan materi atau kekayaan, mempunyai kewajiban baik bagi dirinya sendiri dan orang lain.. Jika kewajiban-kewajiban ini telah terpenuhi, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan materi telah menunjang pertumbuhan spiritual.

## B. SARAN

Berdasar deskripsi di atas, Penulis memberikan berbagai saran dalam Upaya-upaya mewujudkan Kesejahteraan rakyat baik secara materi maupun batin. Dalam hal ini saran-saran Penulis tujuhan untuk pemerintah dan rakyat.

### 1. Saran untuk Pemerintah

Pemerintah hendaknya dapat mencanangkan program-program pengentasan kemiskinan sebagai upaya mewujudkan Kesejahteraan

Rakyatnya. Pemerintah harus kritis bahwa persoalan kemiskinan merupakan masalah krusial yang dapat memberikan efek yang sangat luas. Untuk itu, upaya-upaya dalam mewujudkan Kesejahteraan rakyat harus benar-benar tepat sasaran, berdaya guna, tinggi dan menjangkau semua kalangan dengan seadil-adilnya.

## 2. Saran untuk Rakyat

Rakyat diperkenankan untuk mengumpulkan kekayaan materi agar kesejahteraan batinnya pun terpenuhi, asalkan cara-cara yang digunakan sesuai dengan hukum dan ajaran agama. Buddha telah menunjukkan cara-cara yang tepat dalam rangka mengumpulkan kekayaan. Oleh karena itu, hendaknya sebagai umat Buddha dapat menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Buddha agar tercapai kesejahteraan secara materi dan batin.

## DAFTAR PUSTAKA

- An-Naf, Julissar. 2007. *Pengentasan Kemiskinan Sebagai Sasaran Strategis dalam Pembangunan di Indonesia*. (online). <http://julissarwritting.blogspot.com/2007/11/pengentasan-kemiskinan.html> (26 Juli 2009).
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bhivamsa, Sayadaw U Kundala, 15 Februari 2009. Tinggalkan Tampilan Luar, Ambil Intinya! Terjemahan Suryani, *Majalah Dhammadhakka*, hal 23.
- Dhammananda, Sri. 2005. *Keyakinan Umat Buddha*. Terjemahan Ida Kurniati. Jakarta: Yayasan Penerbit Karaniya
- Dhammadha, Sri. Tanpa tahun. *Masalah dan Tanggung Jawab*. Terjemahan Kalyani Kumiayi. Jakarta: Dian Dharma.
- Direktorat Kewilayahan 1, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, tanpa tahun. (online). <http://www.pdf-search-engine.com/jurnal-pengertian-kesejahteraan-menurut-para-ahli-pdf.html>. (diakses 09 Juli 2009)
- Djalal, Patti Dino. 2009. *Harus Bisa! Seni Memimpin Ala SBY. Jilid 2*. Jakarta: Red & White Publishing
- Dialogue of the Buddha (*Digha Nikaya*) Vol I. Terjemahan Muller, Max. 1977. London: Pali Text Society
- Dialogue of the Buddha (*Digha Nikaya*) Vol III. Terjemahan Davids, Rhys. 1977. Oxford: Pali Text Society
- Estrella Trel E, Taco-Borja, dkk. 2001. *Membangun Budaya Adil dan Damai*. Jakarta: Grafika Mardi Yuana.
- Faturochman. 1992. *Kesejahteraan Rakyat yang Merata: Kapan?*. (online) <http://acadstaff.ugm.ac.id/publikasi/131695237/KORAN%20-%20Kesejahteraan%20Rakyat%20yang%20Merata.pdf>. (diakses 23 Juli 2009)

- Gamal, Merza. 2006. (*Ekonomi-nasional*) Visi Kesejahteraan. (online). <http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/msg06556.html> (diakses 06 Juli 2009)
- Gönner, C., Cahyat, A., Haug, M. dan Limberg, G. 2007. *Menuju Kesejateraan: Pemantauan Kemiskinan di Kutai Barat, Indonesia*. Terjemahan Sugeng Hariyanto. Editor: Tiene Gunawan: Bogor: Center for International Forestry Research
- Hasan, Ahmad Makki. 2007. *Selayang Pandang “Kesejahteraan” Rakyat Indonesia*. (online). <http://www.penulislepas.com/v2/?p=707>. (diakses 6 Juli 2009)
- Kabir, Mu'in Abdul. 2007. *Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Global*, (online) <http://fatkhul83.ohlog.com/pengentasan-kemiskinan-dan.oh29946.html> (diakses 14 Juli 2009)
- Keraf, Gorys. 1984. *Komposisi (Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa)*. Ende Flores: Nusa Indah
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Noer, Melinda. 2008. *Peran Kelembagaan Lokal Dalam Perencanaan Wilayah Desentralisasi (Kasus Studi: Perencanaan Berbasis Nagari Di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat)*. (online) <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdl-melindanoe-33332>. (diakses 29 Juli 2009)
- Sholeh, Moh. 1993. *Telaah Nilai-nilai Ajaran Al Ghazali Sebagai salah satu Alternatif Pendekatan Konseling (Thesis)*. Malang : Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP). (<http://www.google=Online=com/>)
- Sudarwan, Robert Edy. Rabu 15 Juli 2009. Opini. *Lampung Post*, hal. 16.
- Suguno, Bhikkhu. 2005. *Pandangan Agama Buddha tentang Ekonomi*. (online). <http://www.buddhistonline.com/dhammadesana/desana7b.shtml> (diakses 6 Juli 2009)
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sumedha, Widyadharma. 1992. *Dhamma Sari*. Jakarta: Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda

- Suprihatini, Amin dan Yudi Suparyanto, 2006. *Kewarganegaraan. Kelas VIII.* Klaten: Cempaka Putih
- Tanpa Nama. 2004. *Mengapa Beragama Buddha*. Jakarta: Dian Dharma.
- Tanpa Nama. 2006. *Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK*. (online) <http://sanyasyari.com/wp-content/uploads/2006/10/bab4-sejahtera.pdf>. (diakses 23 Juli 2009)
- Tanpa Nama. 2008. *UUD 1945 dan Perubahannya*. Jakarta: P.T Tangga Pustaka
- Tempo. 24 April 2007. *Pengentasan Kemiskinan Dinilai Tidak Berdayakan Masyarakat..*
- The Book Of Gradual Saying (*Anguttara Nikaya*) Vol III. Terjemahan Woodward, F.L&Hare,EM.1972-1978. London: Pali Text Society
- The Itivuttaka. The Buddha's saying (Itivuttaka. Kitab Suci Agama Buddha). John D. Ireland. Terjemahan Lanny Anggawati dan Wena Cintiawati. Bandung: Lembaga Anagarini Indonesia
- The Middle Saying (*Majjhima Nikāya*) Vol I. Terjemahan Horner, I.B. 1987. London: Pali Text Society.
- The Word of The Doctrine (*Dhammapada*). Terjemahan Norman. 2000. Oxford: Pali Text Society.
- Tim Penyusun. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Prima Pena, Tanpa tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tanpa Kota: Gita Media Press
- Zed, Mustika. 2004. *Metode Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.